



ANTISIPASI KEMACETAN DI JANTUNG KOTA

Dewan Wacanakan Larangan Bus Masuk Yogya

YOGYA (KR) - Rekayasa lalu lintas di Kota Yogya mendapat catatan serius dari kalangan dewan. Terutama seiring proses pembahasan regulasi terkait penataan transportasi lokal. Larangan bus masuk wilayah dalam kota pun diwacanakan guna mengantisipasi kemacetan di jantung kota.

Ketua Panitia Khusus (Paribus) Raperda penataan Transportasi Lokal yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Bambang Seno Baskoro, mengungkapkan wacana bus yang dilarang masuk area kota ialah armada dimensi besar. "Hanya bus besar saja yang dilarang, sedangkan bus ukuran kecil masih boleh. Sebagai gantinya, nanti disiapkan armada penghubung atau shuttle bus yang ukurannya lebih kecil," urainya,

Selasa (28/3).

Wacana itu, imbuhnya, perlu dilontarkan mulai saat ini. Pasalnya, hasil kajian yang dilakukan oleh kalangan akademisi, Kota Yogya diprediksi bakal mengalami persoalan kemacetan secara lebih serius pada 2023 mendatang atau hanya tinggal enam tahun ke depan. Jika tidak segera dilakukan upaya rekayasa lalu lintas secara fundamental, dikhawatirkan kemacetan yang terjadi bisa berdampak luas dalam tatanan kehidupan.

Bambang Seno menyebutkan, kondisi beban lalu lintas di Kota Yogya sebenarnya sudah dapat dirasakan pada hari-hari biasa. Terutama pada jam padat kendaraan, yakni saat waktu berangkat dan pulang kerja atau sekolah.

"Kalau puncak kepadatan memang dirasakan saat momentum liburan. Tapi hari biasa pun sudah terasa. Daerah tertentu seperti pusat kota, bisa dilihat seperti apa. Apalagi laju kendaraan terus bertambah setiap tahun tanpa diikuti peningkatan kapasitas jalan," paparnya.

Terkait kebijakan strategis larangan bus besar masuk Yogya tersebut, diakuinya membutuhkan lintas koordinasi di tingkat DIY. Namun aglomerasi transportasi perkotaan harus segera dilakukan supaya aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan optimal. Pasalnya, jika sudah terjebak kemacetan, maka produktivitas dapat terganggu.

Sedangkan menyangkut Raperda Penataan Transportasi Lokal, menurut Bambang

Seno, pihaknya memprioritaskan moda non bermotor seperti andong, becak kayu serta sepeda onthel. Bahkan, ke depan, pusat kota harus diprioritaskan bagi armada lokal tersebut. Sarana dan prasarana juga perlu disediakan sejak saat ini.

"Kalau transportasi lokal ini sudah kami siapkan zona khusus. Seperti kawasan cagar budaya dan pusat wisata. Di antaranya kawasan Malioboro, Kraton, Pakualaman, Kotagede dan Kotabaru yang kondisi jalannya tidak terlalu lebar," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya, Wirawan Haryo Yudo, menilai wacana larangan bus besar masuk Yogya memang patut dipertimbangkan. Akan tetapi, sebelum kebijakan strategis tersebut dipu-

tuskan, perlu ada kajian secara mendalam guna mengantisipasi dampak sosial. Hal ini lantaran dampak sosial dan ekonomi juga akan menyertai.

Sejumlah persiapan yang harus dipenuhi guna menggulirkan kebijakan tersebut di antaranya sarana kantong parkir di pinggiran kota atau bahkan di luar kota, serta kebutuhan armada penghubung. Di samping itu, regulasi daerah juga perlu disiapkan agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

"Kami sejauh ini masih menunggu pembahasan regulasi terkait penataan transportasi oleh lembaga dewan. Kalau wacana larangan itu juga sudah pernah digulirkan, tapi harus dipertimbangkan dari banyak sisi dulu," ujarnya.

(Dhi-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005